

PENGARUH KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Syahrul Hanafi¹

¹Institut Pesantren Kiayi Haji Abdul Chalim (IKHAC)

Email: Syahrulhanafi91@gmail.com

Abstract

The success of development is not sufficiently measured by using only economic measures but also must be supported by non-economic indicators. Where to measure the development of a State based on non-economic indicators that use Human Development Index (HDI). But in its activities, developing countries in both Asia and Africa are often hampered by high corruption practices. Based on this the authors are interested to see the effect of corruption on the provincial capitals in Indonesia. This study aims to see the effect of corruption in Indonesia as reflected in the Corruption Perception Index (IPK) on human development (HDI). The research design used is quantitative analysis. Sampling is done by using judgment sampling technique, where the research sample is some provincial capital in Indonesia with the data fulfill the criteria, so total data is 54 from 18 provincial capitals and three years of observation (2006, 2008, 2010). The analytical technique used to answer all objectives in this research is to use sregresi data panel analysis. The results show that simultaneously corruption adversely affects human development. This means that the higher the level of corruption, the lower the human development, where the effect of corruption on human development of 11.06%.

Keywords: Human Development, Corruption and Indonesia

PENDAHULUAN

Todaro (2004) menjelaskan bahwa sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Dimana muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi hanya menciptakan tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) yang tinggi semata, melainkan menjadi suatu upaya penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka pembangunan suatu Negara dapat dikatakan berhasil apabila dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan, menyediakan lapangan kerja, dan menyejahterakan penduduknya.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perhatian pembangunan suatu Negara adalah pembangunan manusianya, dimana indikator-indikatornya antara lain seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan hidup (standar hidup). Dimana UNDP dalam mengukur pembangunan suatu Negara adalah dengan *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masalah pembangunan manusia dewasa ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia dan negara-negara berkembang

lainnya. Masalah ini telah menjadi isu global dimana setiap Negara merasa berkepentingan untuk membahas pembangunan manusia, terlepas apakah itu Negara miskin, Negara berkembang, maupun Negara maju. Berbeda dengan Negara maju, aktivitas negara-negara berkembang di wilayah Asia dan Afrika dalam mewujudkan pembangunan negara yang berlandaskan pembangunan manusia terhambat oleh praktek korupsi yang cukup tinggi, hal ini karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2010) mengungkapkan bahwa negara-negara yang relatif kaya mempunyai tingkat korupsi lebih rendah dibandingkan negara-negara miskin. Menurut Karim (dalam Widiastuti, 2008) korupsi menjadi penghambat terbesar perkembangan ekonomi dan manusia.

Sebagai suatu penyakit, korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, hal ini sebagaimana penjelasan dari Frans Magnis Suseno bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada tahap yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (dalam Soemodihardjo, 2008). Pendapat ini tentu didasari kondisi perekonomian negara yang selalu berada dalam posisi kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. Senada dengan pernyataan tersebut, Nasution (2004) menilai bahwa perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih

jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak social dan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Korupsi

Korupsi secara etimologis menurut Hamzah (1995) berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berate suka di suap.

Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto (1977) bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hokum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut "bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas

korupsi". Dari konsiderans tersebut terdapat dua unsur mengenai korupsi menurut Koeswadji (1994) yaitu:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu, badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Darsono (2001) mengklasifikasikan korupsi berdasarkan tipologinya menjadi lima, yaitu:

- a. Korupsi transaksi, merupakan korupsi yang bersifat timbale balik (mendekati kolusi), sehingga saling menguntungkan.
- b. Korupsi memeras, terjadi pada *unbalanced of power*, misalnya pelayanan dibuat sulit sehingga menciptakan uang sogok.
- c. Korupsi investif, berupa pemberian sekarang untuk menuai dimasa yang akan datang.

- d. Korupsi nepotisme, merupakan pengangkatan jabatan karena kekerabatan, kecuali yang memenuhi persyaratan teknis dan prosedur yang berlaku.
- e. Korupsi dukungan adalah upaya mendukung satu pihak agar dapat didukung balik.

Fadjar (2002) pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu:

- a. *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.
- b. *Discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Bupati/Walikota atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Bupati/Walikota yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (*despotis*) maupun dengan keluarganya (*nepotis*).

c. *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktik ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.

2. Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia Sejak tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan laporan tahunan berupa *Human Development Report* (HDR). Dalam HDR tersebut dikeluarkan laporan tahunan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) di tiap negara. Indeks tersebut dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang peraih Hadiah Nobel berkebangsaan India yaitu Amartya Sen, dan seorang ekonom dari Pakistan, Mahbub Ul Haq, yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economic. Amartya Sen menyatakan bahwa HDI adalah sebuah pengukuran indeks manusia yang cukup kasar (*vulgar measure*) karena masih banyak keterbatasan. Namun, HDI menerapkan ukuran pada aspek-

aspek pengembangan kualitas manusia secara lebih komprehensif daripada hanya sekedar pendapatan per kapita seperti yang dilakukan selama ini dalam menentukan atau menunjukkan apakah suatu negara itu negara maju, berkembang, atau belum berkembang. HDI juga merupakan salah satu bahan kajian atau topik pembahasan bagi para peneliti untuk meneliti ukuran-ukuran kualitas manusia di sebuah Negara secara luas dan beragam (Widodo dkk, 2011).

Menurut Amartya Sen, sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*) (Widodo dkk, 2011). Konsep pembangunan manusia yang diprakarsai dan ditunjang oleh UNDP mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.

Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*). Sedangkan IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan (BPS, 2008) yaitu:

- a. Indeks Harapan Hidup
- b. Indeks Pendidikan
- c. Indeks Standar Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Di mana:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i \quad ; \quad I_i = \frac{X_i - \text{Min } X_i}{\text{Max } X_i - \text{Min } X_i}$$

Di mana:

I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana $i = 1,2,3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

$\text{Max } X_i$ = Nilai maksimum X_i

$\text{Min } X_i$ = Nilai minimum X_i

3. Penelitian Terdahulu

Dasar kajian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akcay (2006) dalam studi empirisnya telah mengungkapkan bahwa korupsi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah, kurangnya investasi asing dan domestik, tingginya inflasi, depresiasi mata uang, pengeluaran yang rendah untuk pendidikan dan kesehatan, pengeluaran militer tinggi, kesenjangan pendapatan yang tinggi dan kemiskinan, pendapatan pajak kurang, dan tingkat kematian anak dan bayi yang tinggi. Penelitian ini mengeksplorasi

hubungan antara korupsi dan pembangunan manusia, menggunakan sampel 63 negara. Dalam rangka untuk menguji dampak korupsi pada pembangunan manusia. Hasil uji mengungkapkan bahwa ada pengaruh negatif hubungan antara indeks korupsi dan pembangunan manusia. Bukti empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih korup cenderung memiliki tingkat HDI lebih rendah. Secara singkat, studi ini memperluas daftar konsekuensi negatif dari korupsi dan korupsi dalam segala aspeknya menghambat pembangunan manusia.

Selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Hysa (2011) mengenai hubungan antara korupsi dengan pembangunan manusia di negaranegara pecahan Yugoslavia seperti Albania, Bosnia and Herzegovina, Kroasia, Montenegro, Serbia dan Macedonia, menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dengan pembangunan manusia adalah kuat, kecuali pada Kroasia yang menunjukkan hubungan lemah. Dalam penelitiannya menemukan bahwa korupsi bertanggungjawab terhadap rendahnya perkembangan ekonomi, penghambat investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan, memicu ketimpangan pendapatan, serta tingginya angka kematian bayi dan anak. Selain itu korupsi juga menjadi kendala untuk masuknya investasi asing dan lokal.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nielsen dan Haugaard (2000) yang meneliti korupsi dan pembangunan manusia pada negara Bolivia dan Nikaragua. Hasil penelitiannya menemukan bahwa korupsi menghambat pembangunan manusia. Lebih jauh penelitiannya menunjukkan bahwa korupsi menghambat pembangunan manusia dengan mencegah akses ke pelayanan publik, menurunkan pengeluaran untuk sosial, dan menyebabkan inefisiensi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan kerangka bagaimana sebuah penelitian dilakukan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas yaitu bentuk analisis variabel (data) untuk mengetahui sebab akibat antara dua kelompok data (variabel) atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui akibat korupsi terhadap pembangunan manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan terdiri atas korupsi dan pembangunan manusia di ibu kota provinsi di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kota di di Indonesia. Adapun metode pengambilan sampel pada studi ini adalah menggunakan judgement sample. Judgement sampling adalah penarikan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan

tertentu (Djarwanto, 2001). Penyusun menggunakan beberapa pertimbangan untuk memilih anggota sampel yakni antara lain:

1. Kota yang dipilih merupakan ibu kota dari setiap provinsi.
2. Kota yang dipilih memiliki data observasi yang lengkap selama periode penelitian ini.

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2004). Data sekunder yang diperlukan adalah berupa Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab seluruh tujuan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data panel. Penggunaan model regresi data panel yang ada dalam penelitian ini dimaksudkan agar dalam menganalisis pengaruh IPK terhadap IPM dilihat dari masing-masing kota. Kelebihan utama dari penggunaan data panel yakni penulis akan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan model terhadap perbedaan perilaku diantara tiap-tiap individu (Greene, 2003). Guna mempermudah dalam melakukan analisa data maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Eviews.

HASIL PENELITIAN

1. Uji Kesesuaian Model

Analisis data panel memiliki tiga alternatif model penelitian, oleh karenanya sebelum melakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji kesesuaian model. Dari hasil uji kesesuaian model maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Uji Kesesuaian Model

Variabel	Uji Kesesuaian	Hasil	Kesimpulan
IPM	<i>Chow Test (Common effect or fixed effect)</i>	0,000	<i>Fixed Effect</i>
	<i>Hasuman Test (fixed effect or Random effect)</i>	0.5363	<i>Random effect</i>

Sumber: output Eviews

Dari hasil uji kesesuaian model di atas maka dapat diketahui bahwa model yang sesuai untuk melakukan analisis pengaruh korupsi terhadap pembangunan manusia di Indonesia adalah menggunakan model *Random effect*.

2. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Dari hasil estimasi model *random effect* diperoleh hasil jika sig. t sebesar 0.0254 yang berarti ($p < 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan jika IPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Jika IPK nilainya naik, maka IPM akan naik. Dari hasil estimasi model *random effect* juga dapat diketahui jika nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0.110669 atau sebesar 11,06%. Hal ini berarti variabel IPM dipengaruhi sebesar 11,06%

oleh variabel IPK. Sedangkan sisanya sebesar 88,94% dipengaruhi oleh varian lain di luar model penelitian. Nilai koefisien IPK sebesar 0.931634, artinya peningkatan 1 poin IPK akan menambah 0.931634 poin IPM.

Hasil penelitian mengenai pengaruh korupsi terhadap pembangunan manusia di Indonesia pada periode pengamatan tahun 2006, 2008, dan 2010 menggunakan analisis data panel dengan model random effect diketahui bahwa IPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, artinya semakin rendah korupsi maka semakin tinggi kesejahteraan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Akcay (2006) yang mengungkapkan bahwa ada pengaruh negatif antara indeks korupsi dan pembangunan manusia, dimana negara-negara yang lebih korup cenderung memiliki tingkat human development index lebih rendah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hysa (2011), menemukan bahwa korupsi bertanggungjawab terhadap rendahnya perkembangan ekonomi, penghambat investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan, memicu ketimpangan pendapatan, serta tingginya angka kematian bayi dan anak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nielsen dan Haugaard (2000), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa korupsi menghambat pembangunan manusia, dimana korupsi mencegah akses ke

pelayanan publik, menurunkan pengeluaran untuk sosial, dan menyebabkan inefisiensi ekonomi.

Adapun secara individual (per kota) korupsi dapat berpengaruh positif dan negatif, artinya korupsi dapat berpengaruh berbeda terhadap masing-masing kota yang terdapat dalam penelitian ini. Dilihat dari nilai intersep, kota Pontianak memiliki nilai yang paling tinggi dan kota Ambon memiliki nilai paling rendah. Artinya, kota Pontianak memiliki nilai IPM tertinggi dan kota Ambon memiliki nilai IPM terendah dalam kurun waktu penelitian.

Secara singkat, studi ini memperluas daftar konsekuensi negatif dari korupsi dalam segala aspeknya, termasuk dalam menghambat pembangunan manusia. Dimana dampak yang diakibatkan dari terhambatnya pembangunan manusia di suatu negara yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di negara bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan data panel dengan model *random effect* pada periode pengamatan tahun 2006, 2008, dan 2010. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa secara simultan korupsi memberikan dampak buruk terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Adapun pengaruh korupsi

terhadap pembangunan manusia sebesar 11,06%, sedangkan sisanya yakni sebesar 88,94% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akcay, S. (2006). "Corruption and Human Developmen" *Cato Journal*, Vol. 26, No. 1, 2006, hal 29-48
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Indeks Pembangunan Manusia 2006 - 2007*. Jakarta: BPS.
- Darsono. (2001). "Korupsi sebagai Kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Teori Equity". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 3, No. 2; Agustus, hal 477-487.
- Djarwanto PS. (2001). *Statistik Non Parametrik*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Fadjar. A. M. (2002). *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar Kurniawan. L 2002. Menyikap Korupsi di Daerah. Malang.*
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis 5th edition*. New Jersey: Pearson. Education International
- Hamzah, A. (1995). *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentari*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Hasan, I. (2004). *Analisis Dana Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hysa, E. (2011). Corruption and Human Development Correlation in Western Balkan Countries. *Euro Economica* Issue 4 Vol 30, 2011, hal 148-157
- Koeswadji, H.H. (1994). *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nasution, A.B. (2004). *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*. Jakarta: Aksara Karunia
- Nielsen, M. and J. Haugaard. (2000). *Democracy, Corruption, and Human Development*, University of Aarhus. Denmark.
- Soemodihardjo, R. D. (2008). *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamiknya di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Todaro, M.P. (2004) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerjemah: Haris Munandar*. Jakarta. Erlangga.
- Widiastuti, T. (2008) “Dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara muslim”. *Tesis tidak diterbitkan*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Waluyo, J. (2010). “Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi , dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara.” *Buletin Ekonomi* Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hal 70 - 170.
- Widodo, A, dkk, K. (2011). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor pendidikan dan kesehatan Terhadap pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.